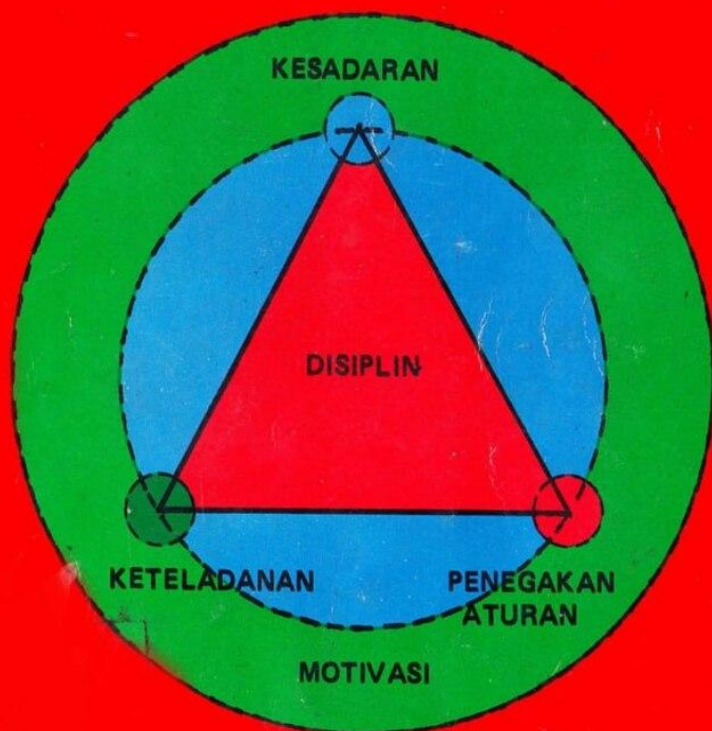


SOEGENG PRIJODARMINTO, S.H

# DISIPLIN

## KIAT MENUJU SUKSES



**UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1987**

**Tentang  
HAK CIPTA  
pasal 44**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

**SOEGENG PRIJODARMINTO, S.H.**

# **DISIPLIN**

## **KIAT MENUJU SUKSES**

Cetakan Pertama

**PT PRADNYA PARAMITA**

**JAKART A**

Versi Pdf Lengkapnya di [ipusnas.com](http://ipusnas.com)

**PRIJODARMINTO, SOEGENG**

**Disiplin Kiat Menuju Sukses/Soegeng Prijodarminto. —**  
**Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.**

**237 hlm.; 21 cm.**

**ISBN 979-408-320-8**

**1. Pegawai Negeri — Indonesia**

**I. Judul**

**353.004**

**DISIPLIN KIAT MENUJU SUKSES**

Oleh : Soegeng Prijodarminto, S.H.

© Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 7 Th. 1987 pasal 44

Diterbitkan oleh : PT Pradnya Paramita  
Jalan Bunga 8-8A  
Jakarta 13140

Cetakan pertama : Tahun 1992

Dicetak oleh : PT ABADI, Jakarta

## **DISIPLIN . . . . . KIAM MENUJU SUKSES !**

Memuat uraian penting antara lain mengenai:

- \* POSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL**
  - Apa sesungguhnya disiplin itu?
  - Disiplin itu harus dimulai dari mana?
  - Disiplin itu untuk siapa?
  - Disiplin pribadi, disiplin kelompok, dan disiplin nasional
  - Apa indikator ketidak disiplinannya itu?
  - Instrumen-instrumen kendali disiplin?
  - Benarkah disiplin PNS itu lemah?
  - Disiplin itu mencerminkan kekuatan
  - Bagaimana PP 30 Tahun 1980 mengatur disiplin PNS.
  - Pendisiplinan yang manusiawi
  - Peraturan perundangan yang secara tidak langsung mengatur pula disiplin PNS.
  - Keberatan atas hukuman disiplin.
  - Beberapa uraian untuk mengenali masalah disiplin.
- \* CARA MEMAHAMI PP 30 TAHUN 1980 SECARA LEBIH MUDAH**
- \* WAJIB BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**\* Oleh : SOEGENG PRIJODARMINTO**





**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

**KATA SAMBUTAN**

Salah satu petunjuk Wakil Presiden RI dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 1991/1992 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 1992 adalah perlunya diusahakan agar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat makin dimasyarakatkan di lingkungan pegawai negeri sipil terutama para pejabat di bidang kepegawaian serta pejabat pimpinan satuan kerja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan aparatur pemerintah terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil masih perlu ditingkatkan.

Aparatur Pemerintah yang diharapkan menjadi pelopor disiplin nasional sebagaimana tercantum dalam Krida kedua Kabinet Pembangunan V, menuntut setiap aparatur pemerintah untuk memahami, menghayati serta melaksanakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil dengan sebaik-baiknya. Dengan cara itulah dapat dipacu terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, mengabdikan kepada tugasnya sesuai peranannya sebagai abdi negara dan sekaligus abdi masyarakat.

Oleh karena itu saya sambut terbitnya buku ini yang akan bermanfaat bagi peningkatan mutu kepemimpinan aparatur pemerintah pada umumnya dan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil pada khususnya.

Jakarta, 6 Oktober 1992

**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**



**IRWONO KUSUMAATMADJA**





**KATA SAMBUTAN**  
**DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN I**  
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

Ada tiga hal yang tidak dapat ditawar bagi bangsa yang maju dan yang ingin maju, yaitu :

1. Disiplin
2. Bekerja keras
3. Banyak belajar

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang dengan tegas dan tekad yang kuat ingin maju. Tekad dan ketegasan itu telah dibuktikan sejak kita memperjuangkan kemerdekaan yang ternyata dilanjutkan pula dalam era kemerdekaan. Tekad dan ketegasan ini akan terus melandasi usaha dan perjuangan kita mengisi kemerdekaan itu yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di sini Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara negara memiliki peranan yang besar karena terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan tergantung pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan *disiplin* para penyelenggara negara serta seluruh masyarakat.

Menyadari besarnya peranan Pegawai Negeri tersebut di atas maka buku *Disiplin Kiat Menuju Sukses* yang ditulis oleh Saudara Soegeng Prijodarminto, S.H ini pantas dibaca dan diresapi maknanya yang terdalam. Sebagaimana tiga hal yang tidak dapat ditawar di atas *disiplin* mendapat tempat utama.

Sesungguhnya suatu karya akan berhasil kalau dimulai dan dikerjakan dengan sikap *disiplin* tersebut. Dengan membaca buku ini saya yakin pembacanya akan terisi dengan semangat juang yang besar dalam membangun negara ini. Pegawai Negeri Sipil, lebih-lebih para Calon Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya membaca, meresapi dan membudayakan jiwa yang terkandung di

dalamnya dan selanjutnya hal itu harus tercermin dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan dalam kehidupan sehari-hari.

Terima kasih.

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,  
DIVISI BIDANG DIKLAT I,



## KATA PENGANTAR

Pada setiap peraturan perundang-undangan selalu terdapat kalimat penutup, suatu kalimat perintah yang berbunyi sebagai berikut: agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Dengan pengundangan itu maka setiap orang dianggap telah mengetahui, tidak ada seorangpun yang dikecualikan, lebih-lebih para Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena pengundangan itu maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai daya berlaku, mempunyai kekuatan mengikat, artinya barangsiapa melanggar, atau tidak melaksanakan ketentuannya, dapat dikenakan sanksi.

Dengan pengundangan itu pula maka setiap orang dianggap telah mengetahui isi ketentuan peraturan perundangan tersebut, tidak peduli apakah orang itu telah membaca atau belum; telah mendengar atau belum, telah mengikuti penyuluhan atau belum. Keadaan ini sama persis dengan apa yang pernah penulis baca dalam sebuah karangan (judul dan pengarangnya, penulis tidak ingat lagi) yang menjelaskan ringkasnya sebagai berikut: "Bahwa di dalam alam semesta ini berlaku hukum daya tarik bumi. Benda apapun yang berada di tempat yang tinggi (lebih tinggi) akan tertarik jatuh ke bumi".

Pensil di atas meja misalnya terguling, jatuh di lantai. Batu dari atas jembatan dilemparkan oleh seseorang akan jatuh ke dalam air, masuk ke dasar sungai. Seseorang yang bekerja di lantai 4 sebuah bangunan, kalau melompat atau terjatuh, akan jatuh membentur bumi. Seorang anak, bayi mungil yang tidak atau belum tahu cara bekerjanya daya tarik bumi, apabila tergolek dari ranjang juga akan jatuh di lantai. Murid SMTA diajarkan ilmu daya tarik bumi, dia mengerti sedikit cara bekerjanya daya tarik bumi tersebut, bila ia terjun dari suatu bukit, tanpa tali akan melorot dan jatuh ke tanah. Demikian pula seorang profesor ahli fisika, yang tahu persis hitung menghitungnya daya tarik bumi, kalau dia melompat dari lantai 4, juga tetap akan jatuh ke tanah", maka, demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah membaca atau belum, mengerti atau tidak, yang belum memahami ataupun bahkan me-

reka yang telah memahami sebaik-baiknya isi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 itu, bilamana melanggar, akan terkena sanksi hukumnya.

Hal ini menyadarkan kepada kita perlunya memahamkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Tetapi, sudahkah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 itu disebarluaskan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil? Benarkah para atasan telah memahami ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 itu? Sudahkah mereka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 itu? Mengapa ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu disuluhkan, dipahami kepada Pegawai Negeri Sipil? Mengapa disiplin itu perlu di waktu Pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan?

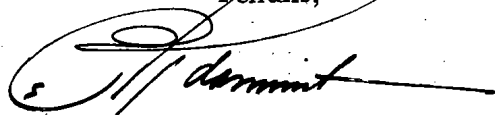
Membaca teks asli suatu peraturan perundang-undangan meski hal itu sesungguhnya merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, namun diakui pada hakekatnya hal itu tidak mudah untuk dapat dilaksanakan. Melalui tulisan ini, dicoba untuk menyajikannya dalam bentuk uraian yang diharapkan akan memudahkan dan dapat membantu para Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui ketentuan-ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan segala permasalahannya, secara mudah karena diuraikan secara sederhana dengan disertakan contoh-contoh. Usaha ini dimaksudkan untuk dapat semakin meningkatkan kadar kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil, tidak terkecuali justru bagi para atasan/para pejabat struktural, yang pertama-tama dituntut untuk menjadi teladan serta sebagai pejabat atasan langsung yang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan.

Tidak ada kesukaran atau hal yang sulit bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap disiplin. Kuncinya terletak pada kemauan dan pengendalian diri.

Kita harus berdisiplin. Seluruh unsur dalam bangsa yang besar ini harus dapat dan bertekad untuk melaksanakannya. Dengan disiplin kita menuju sukses. Semoga!

Jakarta, 8 Juni 1992

Penulis,



SOEGENG PRIJODARMINTO, SH

## PENGANTAR PENERBIT

Bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai tidak lepas dari peran aktif Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi, yang dapat menjadi suri teladan bagi masyarakat umum.

Menyadari pentingnya upaya meningkatkan disiplin nasional, dan untuk memasyarakatkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menganggap sangat perlu untuk menerbitkan buku ini, yang berjudul DISIPLIN KIAMAT MENUJU SUKSES, mengajak kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil untuk lebih memahami dan melaksanakan disiplin dengan penuh kesadaran dalam segala aspek kehidupan, agar dapat terwujud Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam buku ini diawali dengan uraian kedudukan Pegawai Negeri Sipil dengan segala permasalahannya, termasuk hak dan kewajiban.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum dalam mewujudkan serta menegakkan disiplin nasional,

Jakarta, 5 Oktober 1992

Pradnya Paramita



# DAFTAR ISI

	HALAMAN
— KATA SAMBUTAN MENTERI NEGARA PENDAYAGU- NAAN APARATUR NEGARA. ....	vii
— KATA SAMBUTAN DEPUTI BIDANG DIKLAT I LAN	ix
— KATA PENGANTAR .....	xi
— PENGANTAR PENERBIT .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN .....	 1
BAB II : DISIPLIN ITU MENCERMINKAN KE- KUATAN .....	3
BAB III : PERANAN, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL ....	7
A. PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL .	7
B. KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SI- PIL .....	8
C. KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SI- PIL .....	10
D. HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL .....	11
BAB IV : DISIPLIN ITU HARUS DIMULAI DARI MANA? .....	13
BAB V : DISIPLIN PRIBADI, DISIPLIN KELOM- POK, DISIPLIN ORGANISASI DAN DI- SIPLIN NASIONAL .....	19
BAB VI : APA SESUNGGUHNYA DISIPLIN ITU?..	23
BAB VII : PENGATURAN DISIPLIN PEGAWAI NE- GERI SIPIL .....	29
A. BAGAIMANA PEMERINTAH MENG- ATUR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL .....	29
B. JENIS PELANGGARAN DISIPLIN PE- GAWAI NEGERI SIPIL .....	35
BAB VIII : KETENTUAN-KETENTUAN DISIPLIN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PER-	

	ATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980.....	39
	A. KEWAJIBAN .....	40
	B. LARANGAN.....	43
	C. PELANGGARAN DISIPLIN DAN HUKUMAN DISIPLIN .....	44
	D. HUKUMAN DISIPLIN YANG SETIMPAL.....	46
BAB IX	: INSTRUMEN KENDALI DISIPLIN PE-GAWAI NEGERI SIPIL .....	51
	A. BUKU BIRU .....	52
	B. DAFTAR HADIR.....	53
	C. DAFTAR HADIR KEGIATAN PADA ACARA KEDINASAN TERTENTU...	54
	D. LAPORAN KEGIATAN .....	55
	E. DP3 (DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN) .....	56
	F. RUANG KERJA, RUANG RAPAT, HALAMAN KANTOR DAN TOILET..	57
BAB X	: PEJABAT YANG BERWENANG MENG-HUKUM .....	59
	A. WEWENANG PRESIDEN.....	59
	B. WEWENANG MENTERI ATAU JAKSA AGUNG.....	59
	C. WEWENANG MENTERI SEKRETARIS NEGARA.....	60
	D. WEWENANG PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN .....	60
	E. WEWENANG GUBERNUR.....	60
	F. PENDELEGASIAN WEWENANG.....	61
BAB XI	: TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN.....	67
	A. PEMERIKSAAN .....	68
	B. PANGGILAN .....	69
	C. TUJUAN PEMERIKSAAN .....	69



	D. TEKNIK PEMERIKSAAN.....	70
	E. KEWAJIBAN PEMERIKSA.....	71
	F. PENINDAKAN.....	71
BAB XII :	PENDISCIPLINAN YANG MANUSIAWI ...	73
BAB XIII :	KEBERATAN ATAS HUKUMAN DISIP- LIN.....	77
BAB XIV :	BADAN PERTIMBANGAN KEPEGA- WAIAN.....	79
BAB XV :	BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUM- AN DISIPLIN.....	83
	A. CONTOH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG, BERUPA PENUN- DAAN KENAIKAN GAJI BERKALA .	83
	B. CONTOH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG, BERUPA PENU- RUNAN GAJI.....	84
	C. CONTOH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG, BERUPA PENUN- DAAN KENAIKAN PANGKAT.....	85
	D. CONTOH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT, BERUPA PENU- RUNAN PANGKAT.....	85
	E. CONTOH PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT, BERUPA PEMBE- BASAN JABATAN.....	86
BAB XVI :	HAL-HAL YANG BERPENGARUH TER- HADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SI- PIL.....	89
BAB XVII :	INDIKATOR KETIDAK DISIPLINAN....	93
BAB XVIII:	PENINGKATAN PENGAWASAN.....	97
	A. PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI APARAT PENGAWAS DAN APARAT YANG DIAWASI.....	97
	B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGAWASAN.....	98

<b>BAB XIX :</b>	<b>BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG JUGA MENGATUR DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL . . . . .</b>	<b>101</b>
	<b>A. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG PEMBATAHAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM USAHA SWASTA. . . . .</b>	<b>101</b>
	<b>B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL . . . . .</b>	<b>102</b>
	<b>C. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL . . . . .</b>	<b>103</b>
	<b>D. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1974 TENTANG BEBERAPA PEMBATAHAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP . . . . .</b>	<b>105</b>
	<b>E. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL . . . . .</b>	<b>106</b>
<b>BAB XX</b>	<b>UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN MENUJU DISIPLIN NASIONAL . . . . .</b>	<b>107</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN . . . . .</b>	<b>111</b>

## BAB I

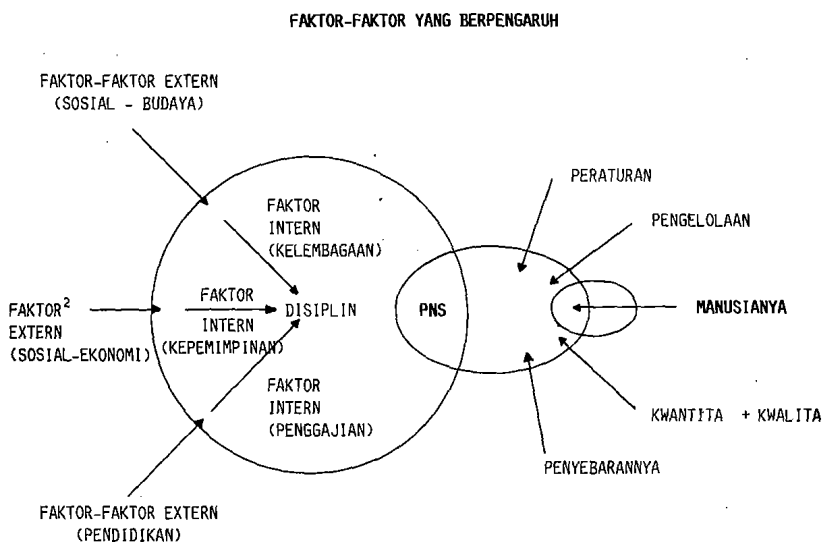
### PENDAHULUAN

Membicarakan hal-hal yang menyangkut Pegawai Negeri Sipil, bagi penulis merupakan sesuatu yang sungguh sangat menarik. Pertama, karena penulis sendiri seorang Pegawai Negeri Sipil dan kebetulan bekerja di suatu instansi yang memang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. Kedua, dengan membicarakan masalah Pegawai Negeri Sipil, sepertinya penulis berdiri di depan sebuah cermin, sehingga dapat melihat kepada dirinya sendiri. Lazimnya bilamana seseorang melihat diri sendiri di depan sebuah cermin, yang nampak tentu diri kita, yang diamati yang baiknya saja. Maklum, melihat hal-hal yang baik yang ada pada diri sendiri sangat mudah, sebaliknya melihat kekurangan yang ada pada diri kita itu adalah tidak mudah, malah tidak mustahil, sulit untuk menemukannya. Melihat permasalahan Pegawai Negeri Sipil, seyogyanya harus mampu melihat secara keseluruhan, yang positif maupun yang negatif, bukan hanya selintas atau yang ada dipermukaannya saja. Hal inilah yang ternyata terasa amat sulit.

Demikian pula halnya melihat permasalahan khususnya mengenai disiplin lingkungan Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan ini, akhir-akhir ini banyak disoroti dan atau dibicarakan. Membicarakan masalah disiplin seyogyanya jangan melihatnya secara sepotong-sepotong, mengangkat atau mengungkit yang jelek-jelek saja, padahal tidak semua Pegawai Negeri Sipil itu disiplinnya tidak baik. Meninjau secara demikian itulah yang dapat memberikan gambaran keliru. Meskipun demikian penulis mengakui bahwa mengulas permasalahan secara mendalam juga akan terasa berat mengingat jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada sangatlah besar dan keberadaannya tersebar di seluruh tanah air dengan karakteristiknya. Oleh karena itu apa yang hendak penulis kemukakan dalam uraian ini sesungguhnya juga sangat terbatas kepada kemampuan dari penulis, melalui hasil pengamatan yang terbatas pula. Di lain pihak perlu disadari bahwa disiplin itu sendiri merupakan suatu kondisi yang menyangkut pada banyak hal yang sangat kompleks, yang sangat mendasar dan banyak segi-segi yang mempengaruhi dan saling berkaitan.

Satu hal lain yang perlu diperhatikan bahwa pelaku disiplin yang dibicarakan adalah Pegawai Negeri Sipil, yang pada hakekatnya merupakan manusia biasa, sehingga permasalahan-permasalahannya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan segi-segi kemanusiaan, yang memerlukan pemecahan secara manusiawi pula. Dengan landasan pemikiran yang demikian itu tak mungkin penulis mencakupnya secara lengkap. Ulasan hanya dari hasil pengamatan secara sederhana, oleh karenanya ulasan ini bukan merupakan suatu uraian ilmiah.

Bagaimana kompleksnya pengenalan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari gambar 1, di mana nampak banyaknya faktor-faktor ekstern di samping faktor-faktor intern pada disiplin, sedang Pegawai Negeri Sipil itu sendiri juga demikian kompleks permasalahannya, ia diliputi pula oleh berbagai faktor yang mempengaruhi dirinya yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur keberadaannya, bagaimana sikap pengelola kepegawaian, bagaimana kondisi jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat ini, serta bagaimana keadaan penyebarannya di wilayah Indonesia yang demikian luasnya.



Gambar 1

## BAB II

### DISIPLIN ITU MENCERMINKAN KEKUATAN

Seseorang yang berhasil atau berprestasi (berhasil usahanya, berhasil sekolahnya, berhasil olahraganya, berhasil mendidik anaknya dan sebagainya) biasanya adalah mereka yang memiliki disiplin tinggi. ✓

Seseorang yang sehat dan kuat biasanya pun mempunyai disiplin yang baik, dalam arti ia mempunyai keteraturan di dalam menjaga dirinya, teratur makan, teratur dan tertib tidur atau istirahat, teratur dan tertib olah raga; teratur dan tertib menjaga kesehatannya, teratur dan tertib dalam segalanya.

Dengan demikian ciri utama dari disiplin adalah adanya keteraturan dan ketertiban itu. ✓

Keluarga yang menerapkan disiplin secara baik akan mewujudkan suatu gambaran kehidupan keluarga yang bergairah, tertib, teratur, sehat dan kuat. Biasanya diikuti dengan kehidupan yang rukun dan bahagia pula. Orang tua atau sepasang suami istri yang menjaga anak-anaknya secara teratur akan menghasilkan anak yang teratur. Orang tua atau suami istri itu sendiri juga memberikan contoh, menunjukkan bagaimana menerapkan nilai-nilai disiplin itu. Dari apa yang dilakukan oleh orang tua akan menjadi panutan atau ikutan bagi anaknya. Keteladanan ini merupakan ciri kedua dari disiplin.

Orang tua yang menerapkan disiplin yang baik di lingkungan keluarganya akan mudah dibedakan dengan keluarga yang kurang atau tidak menerapkan disiplin kepada anak-anaknya. Dengan demikian apabila setiap insan, setiap keluarga menyadari betapa pentingnya disiplin dan mau melaksanakan disiplin itu sendiri, maka akan menjadikan bangsanya, sebagai bangsa yang kuat. Disiplin bangsa itu dimulai dari unit terkecil di dalam negara yaitu keluarga.

Demikian pula bilamana setiap insan Pegawai Negeri Sipil, berdisiplin, tidak mustahil, instansi atau organisasi di mana mereka bekerja akan memperlihatkan sebagai suatu organisasi yang sehat, suatu organisasi dengan iklim yang sehat, yang kuat dengan prestasi yang dapat diandalkan. 127

Bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan bangsanya, maka dapat dimengerti bahwa tumpuan diletakkan antara lain kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Apabila disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak baik, sudah barang tentu sasaran-sasaran pembangunan tidak dapat dicapai tepat pada waktunya, bahkan sangat mempengaruhi berhasilnya pembangunan itu sendiri. Untuk maksud itulah diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kuat baik dalam sikap mentalnya, spiritualnya yang tahan serta terkendali dalam menghadapi segala godaan dan ujian. Menurut hemat penulis secara keseluruhan keadaan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada umumnya adalah baik. Keadaan disiplin yang baik tersebut memang kadang-kadang tercemari oleh sikap sebagian kecil Pegawai Negeri Sipil, oleh perbuatan atau tindak tanduk dari Pegawai Negeri Sipil yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahan menghadapi godaan jasmaniah ataupun batiniah, sehingga menimbulkan gangguan di dalam melaksanakan pengabdian, pelayanannya dan yang akhirnya menimbulkan kesan gambaran buruk kepada keseluruhan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebenarnya masih terlampau banyak, bahkan sebagian besar Pegawai Negeri Sipil itu tetap berbhakti, mengabdikan dan melayani secara baik, walau tingkat kesejahteraannya belum dapat dikatakan mampu menunjang kehidupannya. Banyak di antara Pegawai Negeri Sipil yang tanpa pamrih berdharma bhakti, bahkan penuh dedikasi untuk turun ke pelosok-pelosok demi peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga atau dalam bentuk pembangunan prasarana fisik. Banyak di antaranya yang tanpa pamrih dengan kesendiriannya berada di menara-menara, di puncak gunung sebagai pengamat atau menjelajah dari desa ke desa sebagai penyuluh atau mantri statistik misalnya.

Banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas-tugas penelitian berada di tengah kesunyian hutan dan dinginnya udara pegunungan, jauh dari keramaian, jauh dari keluarga. Nampak betapa pengabdian, kepatuhan dan rasa tanggung jawab yang kuat ditunjukkan oleh Pegawai Negeri Sipil demi tugasnya. Semangat yang demikian perlu dipupuk dan dikembangkan untuk menegakkan disiplin kepada seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil. Pengendalian dan penguasaan dirinya merupakan sumber kekuatan di dalam menegakkan disiplin. Kita patut menaruh hormat kepada

saudara-saudara kita Pegawai Negeri Sipil yang demikian berani ulet, tabah dan gigih, jauh dari rasa materialisme, kemewahan dan gaya konsumerisme. Bahkan mereka menunjukkan sikap tekun dan kerja keras. Disiplin itu mencerminkan kekuatan. ✓

Bagaimana arti pentingnya disiplin dapat kita lihat dari apa yang telah ditetapkan oleh lembaga MPR dalam TAP MPR-RI Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pada arah dan kebijaksanaan Pembangunan Umum, angka 35, yang dikutip sebagai berikut:

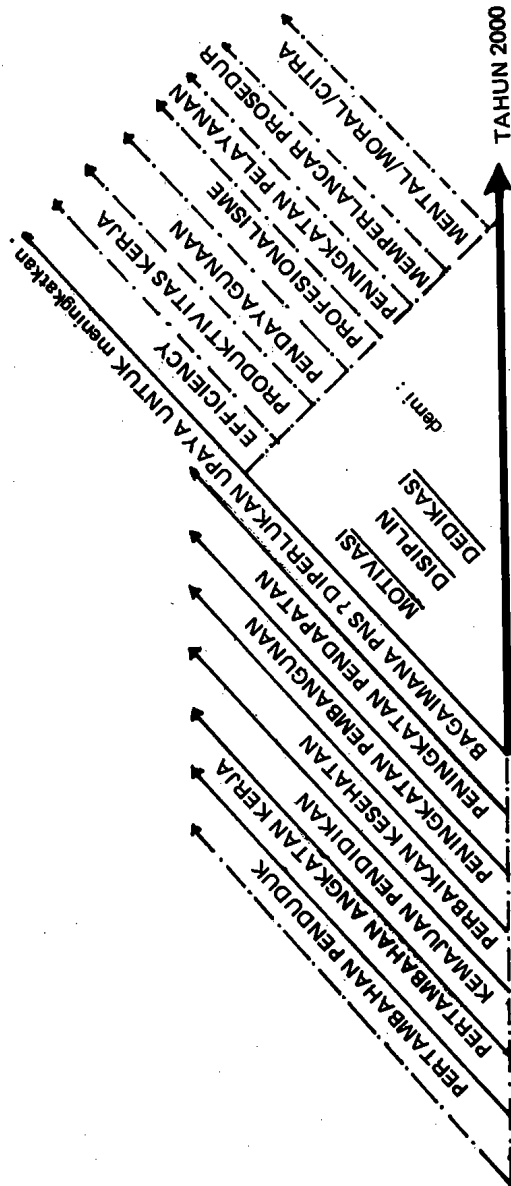
Dengan semakin meningkatnya dan kompleksnya pembangunan, perlu makin ditingkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang dilandasi oleh disiplin serta rasa tanggung jawab dan semangat pembangunan yang tinggi, sehingga benar benar dapat dicapai efisiensi nasional dalam pembangunan. Penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah dan aparatur pembangunan harus semakin ditingkatkan guna menciptakan aparatur yang bersih, berwibawa dan berkemampuan.

Sebagaimana diketahui, permasalahan disiplin inipun menjadi salah satu krida, dalam Panca Krida Kabinet Pembangunan V menandakan betapa pentingnya masalah itu. Krida kedua menyatakan:

Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pada saat ini, di mana bangsa Indonesia akan segera memasuki era tinggal landas (gambar-2) disiplin Pegawai Negeri Sipil memang menjadi faktor utama untuk menuju sukses. Tanpa dilandasi tingkat disiplin yang tinggi, mustahil cita-cita pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara berhasil. Kita berpacu dengan waktu.

ERA TINGGAL LANDAS



BERPACU DENGAN WAKTU

Gambar 2



## BAB III

### PERANAN, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kita sebagai Pegawai Negeri Sipil harus menyadari akan posisi kita. Dengan telah memilih dan menentukan sikap atau nasib kita menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka kita memasuki suatu arena dengan "aturan permainan" yang berbeda seandainya kita tidak memilih profesi itu. Ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya membatasi, ada hak di samping kewajiban. Kita terikat karena kita mempunyai status yang berbeda dengan warganegara Indonesia lainnya, meski kita bukan warganegara yang istimewa apalagi diistimewakan. Perhatikan gambar 3.

#### A. PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Telah kita ketahui bersama bahwa kedudukan seseorang membawa pengaruh pada peranannya, di lain pihak kedudukan membawa konsekwensi akan tugas dan kewajiban serta hak yang melekat kepada kedudukan yang dimiliki oleh seseorang itu.

Kita semua adalah Pegawai Negeri Sipil. Tetapi belum semua Pegawai Negeri Sipil mengetahui secara benar peranan, kedudukan, kewajiban, larangan dan hak-haknya. Bahkan lebih banyak di antara Pegawai Negeri Sipil yang baru mengetahui sebagian haknya tanpa mengetahui secara benar kewajiban-kewajibannya.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah *menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.*